POLITIK HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Nurshoim Ramadhan Putra¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹nurshoimrp@gmail.com, ²irwantriadi1@yahoo.com

***ABSTRACT;** Part Five (Article 109) of Law Number 6 of 2023, which enacts Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, addresses Limited Liability Companies. It amends Article 1 of Law Number 40 of 2007 to state that Corporate Social Responsibility (CSR) involves companies contributing to sustainable economic development and improving quality of life and the environment. The research uses a normative juridical approach, relying on library materials and relevant regulations. The obligation for companies to fulfill their social responsibilities has sparked debate in Indonesia. While companies typically focus on profit maximization, they are now required to positively impact their communities and environments. This reciprocity requires companies to give back to the community and the natural resources they use. Analyzing the legal politics surrounding the implementation of Social and Environmental Responsibility under current Indonesian regulations is particularly compelling.*

***Keywords:** Company, Corporate Social Responsibility, Sustainable Development Goals.*

ABSTRAK; Bagian kelima (Ps. 109) pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membahas mengenai Perseoran Terbatas dengan di dalamnya mengubah ketentuan Ps. 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menjelaskan jika Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan salah satu kewajiban Perseroan yang berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Metode Penelitian yang penulis gunakan dengan metode yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan bahan pustaka (data sekunder) sebagai dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran pada peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kewajiban Perseroan dalam fungsinya menjalankan Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat dan Lingkungan sesuai yang tertuang di peraturan yang berlaku menjadi perdebatan untuk beberapa Perseroan di Indonesia, dengan Perseroan orientasinya adalah untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, saat ini diharuskan juga untuk memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perseoran itu berada atau untuk masyarakat secara umum. Hal tersebut sebagai timbal balik setiap Perseroan yang beroperasi di sekitar lingkungan masyarakat dan mengelola sumber daya alam untuk prinsipnya mengembalikan apa yang telah meraka ambil untuk bisnis Perseroan nya ke alam dan masyarakat

umum. Menarik untuk menelaah berdasarkan Politik Hukum penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perseroan, Tanggung Jawab Sosial, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Undang-Undang Cipta Kerja selanjutnya disebut (UUCK) mencabut beberapa Ps. yang terdapat pada Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 selanjutnya disebut (UUPT) tetapi mengenai Tanggung Jawab Sosial selanjutnya disebut (TJSL) tidak ada ketentuan yang dirubah ataupun di tambahkan dari UUPT. Hal tersebut menandakan peraturan TJSL masih sesuai dengan Ps. 74 UUPT yang dalam intinya menerangkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam maka wajib hukumnya untuk menjalankan TJSL, dan dalam Ps. tersebut juga disebut terdapat sanksi yang dapat di jatuhkan terhadap Perseroan yang tidak menjalankannya.

Sejarah lahirnya TJSL ini tidaklah timbul secara tiba-tiba, tetapi melewati juga berbagai macam proses diawali dari zaman Romawi KuNo sebagai premarkasa awal gagasan yang kemudian diakui sebagai temuan ilmu hukum yang dikenal sebagai “*master piece*”, yaitu diakuinya perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum sebagaimana layaknya manusia yang cakap dan mampu bertindak. Teori tentang perseroan sebagai Separate Legal Entity tersebutlah yang membawa perubahan besar di dunia usaha yang menimbulkan berbagai paham baru muncul, antara lain paham bawah bukan hanya manusia yang dapat melakukan tinda pidana, namun perseoran juga dapat melakukan tindak pidana. Maka perseoran wajib memperhatikan perilakunya dalam menjalankan aktifitas usahanya di masyarakat, karena jika tidak maka perseroan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dengan manusia.¹

Terkait ketentuan tersebut menjelaskan bahwa TJSL menjadi kewajiban bagi Perseroan untuk selain menjalankan kegiatan usahanya yang dapat memperoleh keuntungan juga diwajibkan untuk menjalankan TJSL dengan targetnya adalah Masyarakat dan Lingkungan

¹ Achmad Bidman, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma, Tinajuan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseoran Terbatas, “Jurnal NOTARIUS”, Volume 13 Nomor 1 (2020), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/Notarius> (diakses pada 3 September 2024)

sekitarnya yang sesuai dengan ketentuan dalam UUPT menjelaskan bahwa kewajiban ini ditujukan untuk Perseoran yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam. TJSL merupakan bentuk tanggung jawab perseoran terhadap lingkungan, kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan tanpa mengabaikan kemampuan perseoran itu sendiri.

Pelaksanaan TJSL oleh perseoran ini harus menghormati dan memerhatikan suatu adat istiadat masyarakat sekitar lokasi kegiatan, yang mana ini adalah sebuah konsep dimana perseoran memiliki tanggung jawab mencakup masyarakat, lingkungan, konsumen, karyawan, dan pemegang saham dalam seluruh aspek operasionalnya. Penerapan TJSL akan mempengaruhi keberlangsungan perseoran. Keputusan perseoran juga wajib mempertimbangkan bukan hanya aspek keuangan (*finansial*) seperti laba, tetapi juga dampak sosial baik di masa kini maupun di masa depan.²

TJSL ini juga dikaitkan dengan penemuan pendapat yang dikemukakan oleh John Elkington yang menjelaskan konsep “3P” (*profit, people, and planet*) yang menjelaskan bahwa perseoran dapat bertahan pada lingkungan bisnis, sangat penting juga untuk memperhatikan konsep 3P tersebut. Pandangan dari konsep ini adalah perseoran untuk mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit*), melainkan juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan (*planet*).³

Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di suatu lingkungan yang saling bersinggungan antara karyawan dari perseoran tersebut dengan masyarakat di sekitar perseoran itu menjalankan operasional nya, maka dapat dianggap perseoran tersebut juga merupakan bagian dari suatu ekosistem masyarakat, yang perseoran secara moral memiliki beban untuk ikut berdampak juga di masyarakat sekitar, salah satu yang dapat dilakukan oleh setiap perseoran itu adalah dengan menjalankan TJSL sesuai dengan kemampuan setiap perseoran tetapi juga tetap berfokus manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

² Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 2

³ Moody Rizqy Syailendra P and Cindy Laurencia, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia*, "Jurnal Of Social Science Research", Volume 3 Nomor 6 Tahun (2023), <https://j-inNovative.org/index.php/InNovative> (diakses 3 September 2024)

Penentuan kemampuan perseroan untuk menentukan batas bawah atau minimum anggaran dalam menjalankan TJSL dalam UUPT dan UUCK belum dijelaskan untuk menyebutkan minimum prosesntase setiap perseroan mengganggarkan sekian persen dari keuntungan bersihnya, hal ini yang menimbulkan perseroan menjalankan TJSL hanya sebatas penggugur kewajiban dari Norma yang tertulis dari Undang-Undang tetapi tidak sesuai dengan cita-cita peraturan tersebut, yang mana setiap perseroan diwajibkan menjalankan TJSL adalah untuk memberikan dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan apa yang perseoran tersebut dapatkan dari lingkungan dimana setiap perseroan menjalankan aktivitas bisnisnya.

TJSL yang diwajibkan untuk beberapa perseroan oleh UU walaupun belum adanya peraturan mengenai minimum anggaran TJSL yang harus ditetapkan oleh setiap perseoran, tetapi di zaman modern sekarang ini perhatian setiap perseoran untuk menjalankan kegiatan perseroan yang sangat ramah, yang bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan bermacam-macam aspek dan kondisi di masyarakat, terutama prinsip keberlanjutan yang akan menciptakan kondisi yang stabil dan kelangsungan perseroan.⁴ Hal ini yang menjadi penguat penjelasan mengenai kewajiban perseroan yang menjalankan aktivitas bisnisnya berkaitan dengan sumber daya alam untuk menjalankan TJSL.

TJSL yang dijalankan secara baik dan berkelanjutan dapat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap perseroan di suatu daerah, serta manfaat sebenarnya dari menerapkan TJSL antara lain : Pertama, perseroan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta mendapatkan citra positif dari publik, kedua, perseoran akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap pendaan atau modal, dan ketiga adalah perseoroan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.⁵

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, merumuskan sebagai suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas ?

⁴ Yusuf WibisoNo, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 7.

⁵ Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2017), hlm. 19

2. Bagaimana urgensi penetapan minimum anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan beserta sanksi bagi perseroan yang wajib menjalankannya ?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal dengan metode yuridis Normatif, yaitu dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pendekatan pendapat hukum untuk menganalisis mengenai politik hukum pada perseroan terhadap menjalankan TJSL. Analisis dalam penulisan berikut dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sebagai data utama nya, dan Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Metode deskriptif kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, yang menjelaskan temuan berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber utama atau sekunder, dan dianalisis secara deskriptif. Penulis akan menjelaskan dan menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia pada awalnya sebelum ditetapkan UUPT sampai dengan UUCK hal mengenai TJSL belum ada aturannya dan bahkan kegiatan TJSL inipun menjadi hal yang sifatnya sukarela tidak menjadi suatu beban kewajiban dari perseroan untuk menjalankannya, karena orientasi dari perseoran hanyalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pasca diterbitkannya peraturan yang mewajibkan perseroan yang dalam lini usahanya berdampak kepada sumber daya alam mulailah meningkat secara kuantitas kegiatan TJSL yang dilakukan di Indonesia.

Kaitannya dari pandangan B. Taman Achda, Menurut konsep TJSL yang relevan di Indonesia, yang dikenal sebagai Community Development, program-program tersebut sebaiknya berorientasi pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan organisasi lokal, dan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.⁶

Ketentuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶ H.B. Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2009, hlm. 15.

Dalam UUCK memuat ketentuan mengenai TJSL yang tercantum pada Bagian Kelima mengenai Perseoran Terbatas Ps. 109, yangmana mengenai penjelasan terkait TJSL sebenarnya tidak ada perubahan dari Ps. 74 pada UUPT yang sama-sama berbunyi sebagai berikut, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseoran sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”, hal inilah yang sama termuat pada ketentuan umum. Dalam UUCK peraturan mengenai TJSL hanya termuat mengenai defisini nya itu sendiri yang tanpa ada perubahan di dalamnya, terkait dengan hal-hal lainnya masih mengacu terhadap UUPT pada Ps. 74.

Definisi TJSL yang tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan adaptasi dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan dalam konteks masyarakat Indonesia, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan bahkan sering di identifikasikan dengan CSR adalah *Corporate Philantropy*, *Corporate Responsibility*, dan *Corporate Policy*, ketiga nama lain tersebut dikemukakan oleh Brodshaw dan Vogel dengan penggambaran di setiap defisini tersebut adalah :.⁷

1. *Corporate Philantropy* adalah kegiatan amal yang dilaksanakan oleh perseroan, di mana kegiatan tersebut tidak terkait langsung dengan operasional perseroan,
2. *Corporate Responsibility* Adalah langkah yang menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial perseroan, meskipun perseroan berfokus pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat hubungan antara perseroan dan pemerintah, terutama dalam hal pengaruh kebijakan pemerintah terhadap posisi tawar menawar perseroan serta dampaknya bagi perseroan dan masyarakat luas.

Ketentuan yang termuat dalam UUCK dan UUPT mengenai TJSL tidak ada perubahan maka perseroan yang diwajibkan untuk menjalankan TJSL adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/ berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) . Dari defisini berikut menjelaskan baik perseoran yang secara langsung memanfaatkan SDA sebagai bisnis utama

⁷ Erna Amalia, Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, ADIL:Jurnal Hukum Vol.10 No.2, Tahun (2019), <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/issue/view/119>, (diakses pada 4 September 2024)

dari suatu perseroan ataupun perseroan yang tidak terlibat langsung terhadap SDA tetapi sebagai fasilitator dari perseroan lain yang memanfaatkan SDA, maka perseroan tersebut juga wajib menjalankan TJSL sesuai dengan yang diamanatkan dalam Ps. 74 UUPT.

Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya UUCK tidak ada perubahan yang menjadi poin perhatian untuk TJSL dibandingkan dengan UUPT, yang mana dalam artian sampai dengan hari ini relevansi setiap perseroan tertentu yang diamanatkan menurut klasifikasi undang-undang wajib untuk menjalankan TJSL tetap mengacu pada Ps. 74 UUPT. Mengenai penjelasan mengenai TJSL dalam kedua undang-undang tersebut sama-sama menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan TJSL ditujukan untuk “berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” yang mana dalam maknanya perseroan selain mengelola SDA sebagai entitas bisnisnya, mereka juga harus memberikan dampak yang kongkrit di lingkungan dan masyarakat sekitar perseroan tersebut berada, sebagaimana peran serta perseroan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan pengembangan potensi dari setiap masyarakat yang berdampak program TJSL oleh setiap perseroan.

Setiap perseroan hari ini dalam menerapkan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap perseroan secara bisnis juga secara bagaimana perseroan ini di anggap baik di masyarakat secara berkelanjutan untuk bisnisnya dan hubungan yang dibangun oleh perseroan dengan masyarakat secara umum adalah melalui TJSL yang dilakukan oleh setiap perseroan, yang mana dalam prinsip tata kelola yang baik ini mencakup beberapa aspek mulai dari keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dasar-dasar itulah yang menjadi kunci utama setiap perseroan wajib menjalankan TJSL adalah di point keterbukaan atau responsibility.⁸ Mengacu pada hal ini maka dapat dimaknai bahwa politik hukum Indonesia mengenai aturan perseroan mengarah pada penerapan prinsip tata kelola usaha yang baik, dengan mencerminkan ditetapkannya Norma tertulis mengenai TJSL di undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahkan hal ini menjadi fokus pemerintah karena tetap di tekankan kembali di UUCK dari yang sebelumnya juga sudah termuat di UUPT.

UUCK dan UUPT yang disini masing saling keterkaitan karena dalam UUCK hanya menjabarkan terkait ketenuan umumnya, sedangkan dalam UUPT lebih spesifik menjelaskan

⁸ Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, , Hangoluan Law Review:Volume 1 Nomor 1, Tahun (2022), <https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/>, (diakses pada 5 September 2024)

bagaimana TJSL itu diterapkan dan untuk siapa saja sasaran nya, hal ini menegaskan bahwa secara peraturan yang berlaku di Indonesia secara tegas menjelaskan bahwa setiap perseoran yang masuk ke kategori berdasarkan peraturan yang berlaku memang diwajibkan untuk menjalankan TJSL atas kesadaran perseoran tersebut dan bukanlah timbul karena ada rasa terpaksa karena dari aturan dan legalitas sudah diatur, tetapi hal ini benar-benar secara sadar dan mandiri untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dalam hal ini untuk mencapai hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh usaha beberapa pihak saja atau bahkan hanya dari pihak pemerintah, perseroan yang dibawah naungan pemerintah (BUMN,BUMD) tetapi juga harus dengan kerjasama yang kongkrit dan nyata dari perseroan swasta di Indonesia. Dorongan dan kolaborasi dari berbagai pihak ini dapat menciptakan dunia usaha di Indonesia yang baik, nyaman, aman, dan yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mempercepat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi negara dan mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Urgensi Penetapan Minimum Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Sanksi Bagi Perseroan yang Wajib Menjalankannya

Perseroan di Indonesia sampai dengan hari ini jumlahnya sudah sangat terhitung banyak sekali mungkin menurut dari website Badan Pusat Statistik (BPS) yang terakhir di perbaharui pada 4 Maret 2024, menyebutkan bahwa jumlah perseroan yang ada di Indonesia mencapai kurang lebih 3 Juta perseroan yang Notabnya ini merupakan perseroan dengan skala kecil sampai menengah. Pemaknaan dari data tersebut dengan jurnal yang penulis tulis ini adalah untuk perseroan dengan skala kecil sampai menengah jumlahnya sudah di angka tersebut, jadi dalam faktanya untuk perseroan di Indonesia yang Notabnya sudah perseroan yang benar-benar stabil dan tergolong perseroan masuk skala nasional atau bahkan internasional dalam bisnisnya itu juga sudah dalam jumlah yang banyak.

Perseroan yang sangat banyak di Indonesia, di hubungkan dengan UUCK dan UUPT yang penulis jadikan sorotan adalah bagaimana peran pemangku jabatan sebuah perseroan di Indonesia untuk menjalankan TJSL yang Notabnya diwajibkan untuk semua perseroan yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada SDA. UUPT menjelaskan juga di Ps. 74 ayat 2 yang dimaksudkan menjadilah kewajiban perseroan untuk melakukan perhitungan dan penyediaan anggaran sebagai biaya perseroan dalam melaksanakan TJSL, selanjutnya dalam UUCK tidak ada pembaharuan mengenai TJSL yang mencantumkan mengenai

ketentuan anggaran ataupun perhitungan biaya dalam pelaksanaan TJSL. Ketentuan penentuan anggaran dan biaya ini menurut penulis dikaitkan dengan peraturan yang berlaku saat ini adalah menjadi ranah dari pemerintah daerah masing-masing yang menentukan batasan dalam skala minimumnya, berapa anggaran dan biaya yang dibebankan kepada setiap perseroan yang melakukan usaha di daerah nya masing-masing, dan perhitungan nya ini di dasarkan dari berapa persen laba bersih perseroan tersebut.

Selang lima tahun setelah diundangkannya UUPT pemerintah mengeluarkan turunan mengenai TJSL yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL (PP TJSL), tetapi dalam PP TJSL tersebut juga tidak menyebutkan terkait dengan anggaran minimum yang ditentukan oleh pemerintah untuk di taati oleh perseroan di Indonesia, hal ini berbanding terbalik dengan salah satu pemerintah daerah. Daerah yang salah satunya menerapkan batas minimal untuk anggaran TJSL adalah Kalimantan Timur, hal itu tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (PerDa KalTim) No. 3 Tahun 2013 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, pada Ps. 23 Ayat 1, yang menuliskan bahwa skema anggaran dan biaya yang diwajibkan untuk perseroan melaksanakan program TJSL adalah tiga persen diambil dari keuntungan bersih perseroan setiap tahunnya. Maknanya secara peraturan yang lebih tingginya yaitu Undang-Undang, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum anggaran yang harus disediakan perseroan untuk menjalankan TJSL

Belum adanya anggaran minimum ini yang termuat dalam UU menjadi kelemahan menurut penulis untuk perseroan dapat memberikan hasil yang jelas, kongkrit dan nyata kepada masyarakat umum & lingkungan berdasarkan dari keuntungan yang setiap perseoran dapat secara tahunan, karena belum semua daerah di Indonesia mempunyai peraturan daerah mengenai batas minimum anggaran untuk TJSL seperti Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan di Indonesia setiap provinsinya terdapat SDA dikelola oleh perseroan baik itu dikelola secara langsung, atau perseroan lain memberikan dukungan kepada perseroan utama dalam mengelola SDA tersebut, seperti contohnya perseroan pembiayaan yang memberikan dukungan pembiayaan kepada perseoran pengelola SDA untuk membiayai operasional bisnis perseroan tersebut, hal itu menjadi saling keterkaitan yang mana perseroan pembiayaan tersebut juga wajib menjalankan TJSL sesuai dengan amanat Ps. 74 UUPT.

Batas minimum yang dapat ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan biaya TJSL dapat mendukung peningkatan pemanfaatan yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat secara umum, secara fasilitas atau bahkan tambaha bantuan pelayanan kepada masyarakat umum dari kegiatan TJSL yang dilakukan oleh setiap perseroan di lingkungan masyarakat, dan dari TJSL ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Tidak adanya batas minimum bagi setiap perseroan untuk menetapkan biaya TJSL menurut penulis menjadikan perseoran dalam menganggarkan biaya TJSL dapat dengan biaya sekecil-kecilnya dari keuntungan bersih setiap tahun nya, tetapi perseroan tetap menjalankan TJSL dengan skala kecil hanya sebagai penggugur kewajiban dari Ps. 74 UUPT.

Akibat hukum yang dikenal terdapat tiga jenis, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Lahirnya, berubahnya/lenyapnya keadaan hukum tertentu,
2. Lahirnya, berubahnya/ lenyapnya hukum tertentu,
3. Sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum,

Akibat hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya/lenyapnya keadaan hukum tertentu, dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya/lenyapnya hubungan hukum tertentu.

Dilihat dari jenis akibat hukum tersebut terlahir dari adanya hubungan hukum yang didalam hubungan hukumnya terdapat hak dan kewajiban, dari hal tersebut apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan atau menerima yang mana menjadi hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang memang sudah ditentukan akan mendapatka apa, maka disitu timbul sanksi yang terlahir dari tidak diterimanya akibat hukum yang saling diharuskan untuk terjadi antara para pihak. Para pihak yang terdampak dalam penerapan TJSL menjelaskan bahwa suatu Perseroan dapat memberikan hasil terbaiknya jika dalam prosesnya memperhatikan dua hal yang dijadikan dasar utama dalam pelaksanaanya, mulai dari manusianya (*people*) dan hasil produksi (*output*) yang diharapkan hasil produksinya (*resources*) sebagai bahan produksi (*input*)¹⁰. Setiap perseroan menerapkan tujuan untuk mencapai ekonomi secara berkelanjutan,

⁹ Carmellsela Rosari Assah, Jeany Anita Kermite, Ivonne Sheriman, Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseoran Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jurnal Lex Privatum Vol.XI/No.5 Tahun (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum>, (diakses pada 5 September 2024)

¹⁰ *Ibid*

maka saat ini setiap perseoran dilihat tidak hanya pada laporan keuangan tahunan (Annual Report) tetapi hal tersebut telah bergeser kepada bagaimana Perseroan dapat memberikan dampak nyata terhadap Masyarakat umum dan lingkungan, yang mana hal ini dilihat dari apa saja kegiatan-kegiatan TJSL yang telah setiap perseoran jalankan per tahunnya. Eksistensi perseoran bergeser selain melihat keuntungan dari perseoran sendiri, juga bagaimana TJSL Perseroan itu dijalankan untuk membangun citra baik Perseroan (*Corporate Image*) mendorong tercapainya ekonomi berkelanjutan.

Sanksi sosial yang akan di dapat perseoran adalah mendapatkannya citra kurang baik di masyarakat secara umum apabila mereka masuk yang diwajibkan menjalankan TJSL, tetapi mereka memilih tidak menjalankannya, citra buruk yang mereka timbulkan dapat berdampak secara berkepanjangan dimulai dari eksistensinya yang meredup akan merujuk kepada keuntungan Perseroan karena tidak adanya kepercayaan Masyarakat umumt terhadap perseoran. Merujuk terhadap Ps. 74 UUPT dan Ps. 3 PP TJSL sama-sama tidak menjelaskan terhadap sanksi hukum yang jelas mengenai perseoran yang wajib menjalankan TJSL tetapi tidak melaksanakannya. Sedangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Ps. 34 Ayat 1 menjelaskan bahwa Perseroan wajib memenuhi hal-hal yang sudah menjadi kewajiban perseoran tersebut sesuai peraturan yang berlaku, jika tidak yang sudah menjadi kewajiban maka dapat dibebankan sanksi administratif sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha penanaman modal, atau
4. Pencabutan kegiatan usaha penanaman modal.

Sanksi administratif yang ditetapkan pemerintah menjadi bentuk nyata pemerintah dalam memaksakan setiap Perseroan untuk menjalankan hal-hal yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah ini dapat mempengaruhi citra atau eksistensi setiap Perseroan dan akhirnya dapat mempengaruhi bisnis Perseroan. Ps. 34 Ayat 3 menjelaskan bahwa Perseroan selain dapat dikenakan sanksi administratif dapat dikenakan sanksi lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi belum adanya peraturan yang menyebutkan selain sanksi administratif apabila ditemukan perseoran yang tidak menjalankan kewajiban TJSL

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung Jawab Sosial (TJSL) dengan bahasa asing yang sering dikenal masyarakat umum adalah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan yaitu di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membahas mengenai ketentuan umum penjelasan TJSL, pihak-pihak yang diwajibkan melaksanakan TJSL berdasarkan klasifikasi bisnis usahanya yaitu perseroan yang mengelola secara langsung atau tidak langsung Sumber Daya Alam. Pelaksanaan TJSL untuk mencapai tujuan Indonesia dengan ekonomi berkelanjutan maka perlu dengan kolaborasi tidak hanya melalui Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) tetapi juga harus dengan kolaborasi dengan para perseroan swasta yang dengan klasifikasi disebutkan dalam UU untuk menjalankan TJSL. Kewajiban yang telah ditetapkan oleh UU untuk setiap perseoran tersebut, tidak di iringi dengan kejelasan ketentuan untuk anggaran yang harus ditentukan oleh setiap perseoran dalam menjalankan TJSL, yang mana ini menimbulkan setiap perseoran bisa menganggarkan untuk kegiatan TJSL adalah dengan anggaran sekecil-kecilnya tetapi melaksanakan kegiatan TJSL hanya sebagai penggugur kewajiban mereka sesuai UU, dan terbebas dari sanksi administratif yang ditetapkan pemerintah, dampak lain dari hal tersebut adalah masyarakat umum tidak bisa mendapatkan manfaat secara maksimal terhadap kegiatan TJSL dari setiap perseoran yang menjalankan setiap kegiatan usahanya di lingkungan masyarakat karena tidak adanya batasan minimum dalam Undang-Undang untuk anggaran TJSL.

Saran

Peraturan dalam TJSL di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, adapun satu peraturan perundang-undangan yang mengenai TJSL di dalamnya hanya mengatur mengenai ketentuan secara umumnya, terkait dengan klasifikasi dan sanksi mengenai TJSL masih tersebar di peraturan-peraturan lainnya, dan terdapat peraturan yang belum di atur mengenai minimum anggaran yang di atur dalam Undang-Undang yang mana hal ini sangat penting untuk setiap perseroan yang wajib untuk menjalankan TJSL mempunyai batas bawah atau dasar penentuan anggaran dari laba bersihnya untuk setiap kegiatan CSR,

maka hal ini menjadi keharusan Pemerintah untuk menetapkan batas dasar bagi setiap perseoran yang diwajibkan sesuai UU menentukan batas minimumnya, karena kondisi Indonesia saat ini yang semakin mudah untuk setiap individu atau kelompok membuat sebuah perseoran, yang mana perseoran tersebut mempunyai lini bisnis bermacam-macam dan jika perseroan masuk ke klasifikasi yang wajib menjalankan TJSL maka perseroan tersebut harus mempertimbangkan juga anggaran yang khusus untuk kegiatan TJSL dengan dasar minimum anggarannya adalah sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang oleh Pemerintah tetapkan dan kedepannya masyarakat umum menerima manfaat secara nyata dari kegiatan-kegiatan TJSL perseroan dan dapat tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan pengembangan potensi dari setiap masyarakat yang berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawatie, Naning. 2017. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Kediri: STAIN Kediri Press.
- Untung, Budi. 2014. *CSR Dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta: CV Andi Offset. Untung, H.B. 2009. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing.
- Achmad Bidman, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma, “Tinajuan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseoran Terbatas”, *Jurnal NOTARIUS*”, Volume 13 Nomor 1 (2020), Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Amalia, Erna, “Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10 No2, Tahun (2019), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Yarsi.
- Carmellsela Rosari Assah, Jeany Anita Kermite, Ivonne Sheriman, “Tinajuan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseoran Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, *Jurnal Lex Privatum* Vol.XI/No5 Tahun (2023), Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Hangoluan Law Review*: Volume 1 Nomor 1, Tahun (2022), Jambi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi.
- Moody Rizqy Syailendra P dan Cindy Laurencia, “Tinajuan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Sebagai Kewajiban Hukum

di Indonesia, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6 Tahun (2023),
Kampar : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perseoran Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 206.

Republik Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Republik Indonesia, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.